

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Dasar dari penelitian ini adalah *Grand Theory* yang merupakan bagian dari agensi teori yaitu *Stewardship Theory*. Menurut Donald Son dan Davis (1991) dalam Anton (2010), *Stewardship* menggambarkan tidak ada satu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan utama yaitu kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah disusun dimana para eksekutif sebagai *Steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya,2017).

Teori *Stewardship* tercipta berdasarkan asumsi filosofi sifat manusia yakni hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas serta kejujuran pada pihak lain. Teori *Stewardship* bisa diterapkan untuk penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan profit lainnya (Aliyah,2012 dalam Wahidah 2015).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Pemerintah Daerah harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci mengenai data akuntansi dan informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat pemerintah daerah bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Implikasi Teori *Stewardship* terhadap penelitian ini yaitu menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan menampung apresiasi masyarakat mampu memberikan pelayanan yang baik untuk publik, dan dapat mempertanggung jawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, guna terpenuhinya tujuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat agar tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *Stewards* (manajer dan auditor internal) mengerahkan seluruh kemampuan dan keahliannya untuk mengefektifkan pengendalian intern agar bisa menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas (Wahida,2015).

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kurun waktu 12 tahun di era reformasi, Indonesia tengah melakukan pembenahan di segala bidang. Termasuk pembenahan dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Saat ini pemerintah dituntut untuk lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana dalam undang-undang ini badan publik memiliki kewajiban harus menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga publik merupakan barang publik yang berhak untuk di peroleh dan diketahui oleh masyarakat. Laporan keuangan itu sendiri secara umum adalah catatan informasi keuangan yang terstruktur dalam suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dan sebagai acuan untuk mengambil keputusan dalam entitas tersebut.

Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Pengertian menurut Sofyan S. Harahap Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan keadaan keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Nordiawan dkk (2009:151) mendefinisikan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas.

Menurut Munawir Sjadzali (2010:5) mendefinisikan laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang bisa digunakan sebagai alat mengkomunikasikan data keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dibuat harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 yang sekarang telah direvisi dengan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis akrual yang kemudian kembali diperbahruhi dengan dikeluarkannya lagi Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan standar

akuntansi berbasis akrual. Tercantum didalam PP No. 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang disusun secara terstruktur mengenai neraca keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan pengertian laporan keuangan daerah atau sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.

2.2.2 Karakteristik Kualitatif LKPD

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah pengukuran normatif yang harus ada dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang baik dan berkualitas. Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 2 Tahun 1980 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* mengatakan informasi akuntansi yang berkualitas harus memiliki manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan biaya menyajikan informasi tersebut. Sebuah informasi akuntansi bisa dikatakan berkualitas apabila setiap pengguna laporan keuangan yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan. Berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah, prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika informasi yang termuat didalamnya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

A. Relevan

Laporan keuangan khususnya laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna, khususnya guna mengevaluasi dan mengoreksi peristiwa masa lalu atau masa kini, hingga bisa untuk memprediksi masa depan, sehingga dapat menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.

Informasi dikatakan relevan jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi tersebut memungkinkan pengguna bisa menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi tersebut dapat membantu pengguna mampu memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu beserta kejadian masa kini.
3. Tepat waktu, yaitu jika informasi yang disajikan tersebut sudah tersedia dan lengkap pada saat informasi tersebut diperlukan, sehingga informasi tersebut bisa dipakai dan berguna untuk pengambilan Keputusan.
4. Lengkap, yaitu informasi yang disajikan haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua informasi akuntansi yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuklah mengungkapkan secara jelas semua informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan, agar dapat mencegah kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut. Agar informasi yang disajikan dapat relevan maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan pemerintah.

B. Andal

Sebagaimana Mardiasmo (2004:35) mengatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Informasi yang andal merupakan informasi yang dapat dipercaya, dalam laporan keuangan pemerintah informasi yang andal yaitu informasi yang bebas bebas dari hal-hak yang menyesatkan dan kesalahan-kesalahan, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi kebenarannya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mungkin saja relevan, jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut jika digunakan bisa membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan dan sudah jelas dapat merugikan pengguna laporan

keuangan. Dikarenakan tidak memasukkan unsur keandalan dalam menyajikan setiap bagian informasi dalam laporan keuangan.

Karakteristik informasi yang andal antara lain sebagai berikut :

1. Penyajian Jujur, yaitu setiap penyajian informasi harus sesuai dengan data atau kejadian yang sebenarnya terjadi, bukan berdasarkan data yang dibuat-buat atau data yang diada-adakan.
2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*), yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan dapat dibuktikan kebenarannya, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu serta kebutuhan peribadi.

C. Dapat Dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih baik jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan tersebut bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan dengan membandingkan laporan tahun lalu dengan laporan tahun sekarang dan hasilnya tidak terlalu jauh berbeda.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan dengan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain yang serupa dengan penerapan kebijakan akuntansi yang serupa atau bahkan sama dan hasil dari pemeriksaan dari perbandingan tersebut menghasilkan hasil yang signifikan tidak terlalu jauh berbeda. Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan maka minimal penyajian laporan keuangan pemerintah harus disajikan dalam 2 (dua) periode atau 2 (dua) tahun anggaran.

D. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini terlihat dari manfaat

informasi yang disajikan terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan format atau bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam kenyataannya, pemerintah masih menghadapi berbagai macam kendala untuk menyajikan informasi yang relevan dan andal tersebut. Kendala tersebut menciptakan suatu keadaan yang tidak memungkinkan terciptanya kondisi yang ideal untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang relevan dan andal ada pun kendala-kendala tersebut seperti kendala keterbatasan (*limitations*) atau bisa juga karena alasan-alasan kepraktisan.

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut, yaitu:

a. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Selama seluruh informasi yang material telah disajikan dalam laporan keuangan maka laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dikatakan wajar. Hal inilah yang mengakibatkan mungkin saja ada suatu informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi akuntansi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Dampak dari pertimbangan biaya dan manfaat tersebut, laporan keuangan pemerintah diperbolehkan untuk tidak

menyajikan segala informasi, apalagi jika informasi tersebut manfaatnya lebih kecil daripada biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi atas biaya dan manfaat membutuhkan proses pertimbangan yang matang. Biaya penyajian informasi tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat, karena manfaat dari penyajian informasi tersebut mungkin saja dinikmati oleh pengguna lain di luar mereka yang menjadi tujuan informasi.

c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif yang diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Bisa saja untuk mementingkan dipenuhinya keandalan suatu informasi, menyebabkan informasi tersebut kurang relevan, begitupula sebaliknya jika relevansinya dipentingkan, mengakibatkan informasi tersebut kurang andal.

2.2.3 Komponen LKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang saat ini telah berubah menjadi OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) setelah diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 akan dikonsolidasi oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan tujuan agar dapat menjadi laporan pemerintah daerah yang mampu mempertanggungjawabkan dari kinerja Bupati, Gubernur maupun Walikota.

PSAP Nomor 1 menyatakan Komponen-komponen mulai dari laporan perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan yaitu:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c) Neraca
- d) Laporan Oprasional

- e) Laporan Arus Kas
- f) Laporan Perubahan Ekuitas
- g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/ APBD. Laporan LRA menyajikan iktisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA sekurang-kurangnya menyediakan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dari suatu entitas pelaporan.

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran tersebut diamanatkan kepada Pemerintah. Dalam pemerintahan, pencatatan telah dimulai pada saat anggaran (APBN/APBD) disahkan dan dialokasikan. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum pemerintah yang akan mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari/ kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Surplus/ defisit LRA adalah selisih lebih/

kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan yang pada akhir periode dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Informasi yang termuat dalam LRA tersebut berguna untuk menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan sehingga para pengguna laporan LRA dapat mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menunjukkan perubahan dan saldo anggaran lebih dalam satu periode. LP-SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

C. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset

nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan sesuai dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

1. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Secara garis tentang jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas serta pengakuan dan pengukurannya pada neraca dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca aset terbagi atas 2, yaitu:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b. Aset Nonlancar

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, serta aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan; d) Jalan, irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

2. Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah terbagi 2 jenis, yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek lainnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu diatas 12 (dua belas) bulan. Kewajiban ini bermaksud didanai kembali (*refinancing*) sebagai kewajiban jangka panjang oleh pemberi pinjaman dan didukung dengan adanya suatu perjanjian terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang memberikan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah dalam menunjukkan kinerja pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos pendapatan LO dari kegiatan operasional; beban dari kegiatan operasional;

surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, bila ada; pos luar biasa, bila ada; surplus/ defisit-LO.

E. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Selain itu, informasi arus kas juga berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Unsur-unsur yang disajikan dalam laporan arus kas antara lain aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: Penerimaan Perpajakan; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Penerimaan Hibah; Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan Penerimaan Transfer.

Sedangkan arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk: Pembayaran Pegawai; Pembayaran Barang; Pembayaran Bunga; Pembayaran Subsidi; Pembayaran Hibah; Pembayaran Bantuan Sosial; Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan Pembayaran Transfer.

2. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: Penjualan Aset Tetap; Penjualan Aset Lainnya; Pencairan Dana Cadangan; Penerimaan dari Divestasi; Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: Perolehan Aset Tetap; Perolehan Aset Lainnya; Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah; Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: Penerimaan utang luar negeri; Penerimaan dari utang obligasi; Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah; Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

Pembayaran pokok utang luar negeri; Pembayaran pokok utang obligasi; Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

4. Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

F. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

G. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. CaLK memberikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
6. Menyajikan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;

7. Menyajikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CALK dilaporkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Sehingga untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CALK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.

2.2.4 Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara khusus, tujuan khusus penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut tercapai. Tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

2.2.5 Peranan Pelaporan LKPD

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.3 Teknologi Informasi

Peran teknologi informasi dalam membantu proses akuntansi dalam perusahaan/organisasi telah lama berlangsung untuk mencapai efisiensi, penghematan waktu dan biaya, peningkatan efektifitas, mencapai hasil/output laporan keuangan dengan benar. Peran teknologi informasi dalam akuntansi sekarang semakin penting.

Sebelumnya, pengertian teknologi informasi menurut Jogiyanto (2008:3) Teknologi Informasi merupakan sub-sistem atau sistem bagian dari sistem informasi.

Menurut Kadir dan Triwahyuni (2003:2) Teknologi Informasi yaitu gabungan antara teknologi komunikasi.

Menurut Williams dan Sawyer (2003) Pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.

Definisi teknologi informasi menurut Darwanis & Mahyani (2009) Dalam penelitiannya adalah teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), menampilkan (*represent*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi.

Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpanan data diluar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat lunak (*software*) (Mulyadi, 2010).

Memfaatkan kemajuan teknologi tidak hanya dalam teknologi komputer, jaringan internet juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya dengan kemudahan untuk mengakses profil pemerintah daerah melalui situs resmi pemerintah daerah terkait.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD adalah suatu sistem yang

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam PP No. 56 tahun 2005, penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diinformasikan melalui situs resmi pemerintah daerah.

Hal ini bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi berarti teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai.

Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010).

Pemanfaatan teknologi informasi termasuk didalamnya pengolah data, pengolahan informasi, serta proses kerja secara elektronik dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan adanya kemudahan dan kemurahan untuk mengakses informasi keuangan. Selain itu, pengolahan data dengan bantuan komputer jelas akan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan. Penerapan pemanfaatan teknologi banyak digunakan pada sektor publik sebagai sarana untuk memberikan kemudahan dalam mengolah dan mengakses data keuangan sehingga output yang dihasilkan lebih terstruktur, rapi, efisien, dan juga efektif.

Selain kelebihan dari pemanfaatan teknologi informasi menurut Yosefrinaldi (2013) teknologi informasi juga memiliki kelemahan yaitu sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer

tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

2.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah. SAP tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

a. SAP Berbasis Akruwal

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akruwal, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akruwal tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akruwal dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penyusunan SAP Berbasis Akruwal dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang membedakan antara **Laporan Keuangan Perusahaan** dengan **Laporan Keuangan Pemerintahan** adalah terletak pada jenis bidang usaha yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan.

b. SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal

Penerapan SAP Berbasis Akruwal dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal menjadi penerapan SAP

Berbasis AkruaI. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruaI. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan.

SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka KonseptuaI Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka KonseptuaI Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.5 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah ciri seorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya Harvesi, (2005:45).

Menurut Nuraini (2013:3) Sumber Daya Manusia adalah keseluruhan orang yang diperkerjakan dalam suatu organisasi, baik lembaga pemerintah maupun organisasi swasta.

Alwi (2008:6) mendefinisikan Sumber Daya Manusia adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang disebut karyawan.

Menurut Yoseprialdi (2013) kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak kepada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dengan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Menurut Robbins (2006:52) Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan berbagai individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.

Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan terus menerus untuk belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi.

Asosiasi Akuntansi Amerika atau *American Accounting Association* (1970) mendefinisikan akuntansi sumber daya manusia sebagai identifikasi sumber daya manusia dan proses pengukuran dan juga sebagai alat komunikasi terhadap berbagai kepentingan. Jadi antara akuntansi dan sumber daya manusia itu sangatlah dekat karena akuntansi bukanlah sesuatu yang berguna jika manusianya tidak paham dan mengerti dengan akuntansi tersebut.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini pengelola keuangan jika tidak memiliki kompetensi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi waktu pembuatan laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya, Mardiasmo (2004:146). Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka semakin baik dalam hal pengambilan keputusan dengan demikian laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas.

Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu : Kemampuan Intelektual dan Kemampuan Fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi serta pelaporan keuangan pada suatu organisasi kemampuan intelektual yang lebih dominan untuk digunakan dibanding kemampuan fisik.

Sumber daya manusia dapat diukur melalui rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman.

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, dengan adanya pendidikan seseorang lebih bisa dipercaya memiliki kemampuan dibandingkan yang tidak memiliki pendidikan, dalam hal ini faktor lain juga dipertimbangkan seperti kemampuan maupun pengalaman. Pendidikan tanpa kemampuan dan pengalaman akan sia-sia, oleh karena itu pendidikan harus diimbangi dengan kemampuan dan pengalaman. Pendidikan juga haruslah akan lebih baik jika nantinya seseorang tersebut bekerja sesuai dengan pendidikan yang ditempuhnya.

Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi, Griffin (2004) dalam Delanno & Deviani (2003). Pelatihan bisa didapat melalui bermacam forum yang diadakan baik dari pemerintah atau swasta. Semakin banyak seseorang mengikuti pelatihan maka berbanding lurus dengan semakin banyaknya pengalaman yang didapat. Menurut Darwanis & Maharani dalam Soimah (2014) mengatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia menunjang organisasi dalam karya, bakat, kreatifitas dan dorongan. Seberapa sempurna pun aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan organisasi dapat dicapai.

2.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya dari beberapa jurnal yang ada untuk mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini, dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil
Karsana & Suaryana (2017) Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli	Variabel Independen 1. Efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan 2. Kompetensi sumber daya manusia 3. Sistem pengendalian intern Variabel Dependen 4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Olah data menggunakan SPSS dengan alat analisis regresi linier berganda.	Berdasarkan hasil penelitian: 1. Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. 3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan
Wati <i>et al</i> (2014) Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi	Variabel Independen 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Sistem	Olah data menggunakan SPSS dengan alat analisis regresi linier berganda.	Berdasarkan hasil penelitian: 1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 2. Standar akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen 4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		laporan keuangan daerah. 3. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 4. Hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Pujanira & Taman (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	Variabel Independen 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel	Olah data menggunakan SPSS dengan alat analisis regresi linier sederhana.	Berdasarkan hasil penelitian: 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Penerapan Sistem

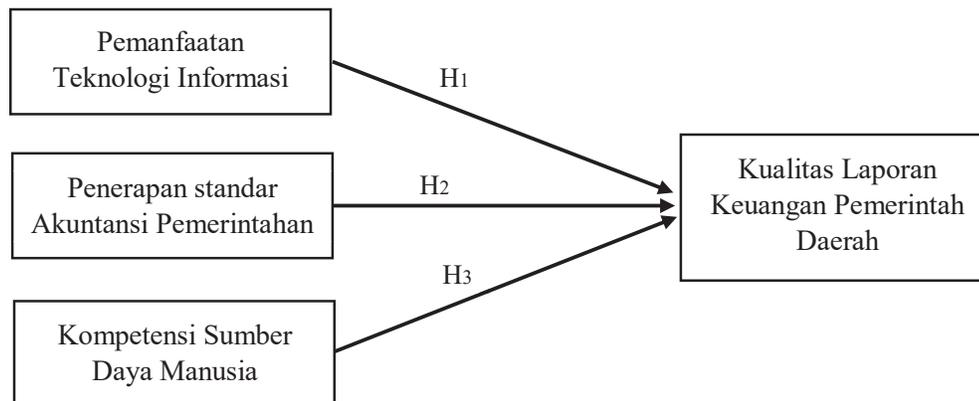
<p>Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY</p>	<p>Dependen</p> <p>4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>		<p>Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>
<p>Noprial Valendra Maksyur (2015) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	<p>Variabel Independen</p> <p>1. Sumber daya manusia</p> <p>2. Komitmen organisasi</p> <p>3. Sistem pengendalian intern</p> <p>4. Pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>5. Kualitas</p>	<p>Olah data menggunakan SPSS dengan alat analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian:</p> <p>1. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>2. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>3. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Mene et al (2018) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara	Variabel Independen 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Variabel Dependen 3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Olah data menggunakan SPSS dengan alat analisis regresi linier berganda.	Berdasarkan hasil penelitian: 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan. 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan.
Hanifa et al (2016) Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi	Variabel Independen 1. Kompetensi Pengelola Keuangan 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Olah data menggunakan SPSS dengan alat analisis regresi linier berganda.	Berdasarkan hasil penelitian: 1. Kompetensi pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Sistem akuntansi keuangan daerah

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Dependen 3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
--	--	--	---

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan review penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1

Berdasarkan gambar 2.1, hubungan antara Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.8 Hipotesis Penelitian

1. Pemanfaatan Teknologi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Arad, Hamed dan Hoda Arad (2009), Teknologi Informasi (TI) merupakan gambaran dari setiap teknologi yang membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan menyebarkan informasi. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Serta dengan adanya pemanfaatan teknologi seperti komputer akuntansi dapat meminimalisir dari kesalahan yang mungkin saja dapat terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian Pemanfaatan Teknologi mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H1 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Jadi dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang ketiga dari penelitian ini adalah :

H2: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Nuraini (2013:3) Sumber Daya Manusia adalah keseluruhan orang yang diperkerjakan dalam suatu organisasi, baik lembaga pemerintah maupun organisasi swasta.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif.

Kompetensi Sumber Daya Manusia berperan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan, karena sebaik apapun sistem atau seanggih apa pun teknologi yang ada dan diterapkan tanpa adanya kemampuan manusia yang dapat menggunakan dan mengoperasikannya dengan baik maka hal tersebut akan menjadi tidak berguna atau sia-sia. Jadi jika SDM tersebut tidak mempunyai kemampuan atau keahlian dalam membuat laporan keuangan dengan baik maka dapat menciptakan suatu laporan keuangan yang tidak berkualitas. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan lebih diperkuat dengan sudah adanya penelitian terdahulu.

(Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011) Studi yang dilakukan Roviyantje (2011) juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini

H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.